

Masyarakat Madani dan Hegemoni Media: Pembentukan Masyarakat Moderat di Era Digital

Kris Nandang¹

¹ IAIN Syekh Nurjati 1: krisnandang99@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

*Society, Moderate, Media
Hegemony*

ABSTRACT

Mainstreaming religious moderation is a must in a pluralistic Indonesian society in the midst of the changing times. This article aims to analyze the succession of the development of a moderate society at the time of the Prophet Muhammad as a stepping stone for the internalization of today's moderation values. Given the rapid development of information and communication media, society is faced with the problem of healthy media from radicalization. By using the literature review method, the author seeks to find the values of moderation instilled by the Prophet Muhammad and then their relevance to the present. The results of this study show: first, the model of civil society is a model of moderate society under the auspices of the moral and intellectual leadership of the Prophet Muhammad. Second, the formation of a moderate society is built holistically in public society and media society. Third, the mainstream of religious moderation in the media is an effort to build hegemony with intellectuals as the axis.

PENDAHULUAN

Pada rentan satu dekade terakhir, Kemenkominfo telah memblokir ribuan situs yang bermuatan negatif termasuk diantaranya situs-situs radikal yang direkomendasikan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) seperti dalam surat dengan Nomor 149/K.BNPT/3/2015 tentang Situs atau Website Radikal ke dalam sistem filtering Kemkominfo (www.kominfo.go.id). Meskipun pada awalnya keputusan pemblokiran tersebut menimbulkan banyak pro/kontra yang berasal dari pemilik, simpatisan ataupun pembaca setia dari situs tersebut. Namun, kegiatan tersebut sebagai wujud preventif dari pemerintah guna menanggulangi penyebaran narasi radikalisme yang marak di media sosial.

Eksistensi radikasasi dalam media semakin menunjukkan taringnya di masyarakat Indonesia. Ditambah dalam sebuah artikel yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI 2017 silam yang berjudul "Masyarakat Indonesia: Malas Baca tapi Cerewet di Medsos", meski minat baca buku rendah tapi data *wearesocial* per Januari 2017 mengungkap orang Indonesia bisa menatap layar gadget kurang lebih 8 jam sehari. Sehingga tidak heran jika orang Indonesia menempati posisi ke-5 dalam hal kecerewetan di media. Berangkat dari realita tersebut, perhatian terhadap media sosial senantiasa meningkat dari berbagai

segmen kehidupan. Masyarakat yang besar lagi plural seperti Indonesia menyimpan potensi akan kekayaan alam, budaya dan sumber dayanya namun juga menaruh potensi akan konflik.

Potret Indonesia berada dalam bayang-bayang perpecahan akibat pengaruh radikalisme yang semakin menunjukkan taringnya. Di tengah masyarakat yang plural, para pemimpin bangsa juga telah memprediksi ancaman-ancaman tersebut. Sehingga puncaknya pada tahun 2019 dikenal sebagai tahun moderasi beragama telah digaungkan, disusun, digagas oleh Menteri agama Lukman Hakim Saefuddin yang diproyeksikan bukan sebatas gagasan namun menjadi gerakan yang membangun tatanan kehidupan beragama di Indonesia (Kemenag RI, 2019: 6). Sehingga lahirlah moderasi beragama yang masuk menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Bahkan pada kegiatan Finalisasi Naskah Akademik Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM (BMBPSDM) di Hotel The Rinra, Makassar, Rabu (15/03/2023) para peserta masih memberikan atensi tinggi pada moderasi beragama sebagai prioritas yang akan masuk pada RPJMN 2025-2029 (balitbangdiklat.kemenag.go.id).

Persoalan radikalisasi berbasis media merupakan ancaman yang nyata bagi masyarakat milenial. Memasuki era disrupsi, masyarakat akan dihadapkan pada perubahan pada setiap elemen kehidupan, termasuk keagamaan. Agama dan media merupakan dua entitas yang terpisah namun dewasa ini selalu mendapat perhatian lebih karena memiliki pengaruh besar bagi masyarakat. Agama dapat melahirkan semangat dan inspirasi bagi pemeluknya karena dianggap sebagai hal transenden dan paripurna.

Kenyataan demikian menjadi landasan sebagian orang dalam memahami teks keagamaan secara sepihak. Hasilnya sentimen keagamaan menelurkan sejumlah polemik eksklusifisme, *truth claim*, dan fanatisme golongan. (Sumanto Al Qurtuby, 2009: 38). Di lain sisi, kehadiran media telah menyampaikan masyarakat pada era *Post Truth* sebagai respon dari penyebaran informasi yang masif. *Post truth* menggambarkan sebuah era dimana peperangan antara validitas informasi yang dikeluarkan oleh beragam media (setkab.go.id). Dalam era ini, kebenaran objektif tidak terlalu berpengaruh terhadap opini publik. Publik tidak sibuk mencari fakta, melainkan mencari afirmasi bagi kebenaran yang diyakininya.

Pengaruh yang besar tersebut kemudian disebut sebagai hegemoni media sosial yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat luas. Salah satu bentuk kekuatan hegemoni adalah adanya kemampuan untuk menciptakan cara berpikir atau wacana tertentu yang dominan. Dominasi dianggap benar sehingga masyarakat meyakini wacana tersebut sebagai sesuatu yang benar, begitu juga sebaliknya

(Christiany Juditha, 2018: 16). Hegemoni merupakan teori Gramsci sebagai analisis bagi relasi antara masyarakat dan negara yang memberikan pengaruh tanpa kekerasan dan kekuatan politik. Namun, hegemoni menekankan hubungan yang bersifat dominasi sebagai kekuatan kepemimpinan intelektual dan moral (Nezar Patria dan Andi Arief, 2015: 117)

Dalam hal ini, Islam telah memberikan proyeksi bagaimana pembangunan pengaruh sebagai hegemoni bagi pembangunan masyarakat yang madani. Nabi Muhamad SAW sebagai seorang pemimpin agama juga wilayah telah berhasil membangun masyarakat madani yang hidup harmoni dalam pluralitas tanpa ada kekerasan. Sukses pembangunan masyarakat madani dapat ditelusuri dari lahirnya piagam madinah yang menjadi sumber undang-undang dan embrio lahirnya konstitusi modern.

Hegemoni Nabi SAW lahir sebagai seorang teladan, pemimpin dan intelektual. Implementasi nilai tersebut layak dieksplorasi, mengingat arus media sosial dewasa ini telah melahirkan wahana hegemoni nilai yang berpengaruh sangat luas. Di sisi lain, banyak intelektual yang mengabaikan tugas mereka untuk berhungan dengan masyarakat, namun ada juga intelektual yang berada di tengah masyarakat terpolarisasi seperti warga lain (Tom Nichols, 2017: 6). Padahal intelektual berperan besar dalam membawa wacana pada arus hegemoni di setiap segmen masyarakat.

Tulisan ini merupakan sebuah upaya menghidupkan Islam yang moderat dan melahirkan solusi-solusi yang senantiasa relevan di setiap ruang dan waktu (*Sholih li kullii zaman wa al makan*). Optimalisasi upaya pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia harus adaptif terhadap perkembangan zaman. Dimana ruang-ruang sosial masyarakat telah mengalami transformasi ke arah masyarakat berjejaring (*networking society*) yang ditandai dengan terbentuknya ruang virtual yang tak bersekat dan luas (Sakaruddin Mandjarreki, 2018: 228). Dengan mengelaborasi sukses Nabi Muhamad SAW ketika menciptakan masyarakat madani yang berwawasan moderat, optimalisasi dan revitalisasi intelektual bermadani harus senantiasa mengisi ruang-ruang publik dewasa ini.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan kajian pustaka (*library research*). Analisis dalam penelitian ini berfokus pada teks atau analisis teks (*content analysis*). Tulisan ini menggunakan teknik analitik-deskriptif sebagai upaya mengelaborasi data historis, ayat dan hadis berkenaan moderasi dan konsep masyarakat madani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potret Radikalisasi dan Media Sosial Indonesia

Semboyan “Bhineka Tunggal Ika” merupakan representasi keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Termasuk dalam kehidupan beragama, Indonesia memiliki banyak agama atau kepercayaan yang dianut seperti Islam, Kristen, Hindu dan lainnya. Ekspresi dalam beragama menjadi salah satu diskursus penting kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Mengingat realita bahwa Indonesia memiliki tingkat populasi yang tinggi di dunia sekitar 275, 77 juta jiwa dengan 1.340 suku bangsa, 718 bahasa yang kaya akan budaya (www.bps.go.id). Seperti dua sisi mata uang, keragaman suku, budaya dan agama memiliki nilai positif dan negatif. Kekayaan akan ekspresi dari persinggungan keragaman menjadi warisan yang harus dijaga. Di lain sisi, persinggungan dari sebuah keragaman juga menyimpan potensi konflik yang besar, baik berlandaskan suku, etnik maupun agama pada aspek kerukunan. (Yoga Irama dan Liliek Channa AW, 2021: 42).

Sebagai mayoritas, sekitar 86, 93 % umat Islam di Indonesia membawa peran domain dalam arus keberagamaan. Sebuah data yang dilansir dari laman *we are social* menyatakan bahwa pengguna media sosial di Indonesia tercatat sebanyak 167 juta jiwa pada akhir Januari 2023 lalu atau setara dengan 60,4 % populasi di dalam negeri. Dari jumlah tersebut sebesar 98,3 % pengguna internet melalui telepon genggam dengan rata-rata menghabiskan 7 jam 42 menit dalam satu hari (dataindonesia.id). Dari kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia dewasa ini lebih banyak berinteraksi melalui ruang media ketimbang ruang publik secara langsung.

Kontrol terhadap pesatnya arus informasi yang bertebaran di media sosial semakin liar dan memprihatinkan. Pemerintah telah menggalakan berbagai upaya termasuk diantaranya melakukan pemblokiran terhadap situs-situs negatif dan bermuatan radikal. Abdul Wahid dalam bukunya “Masyarakat dan Teks Media: Membangun Nalar Kritis atas Hegemoni Media”, mencurahkan perhatiannya pada potensi dan tantangan hegemoni media. Pada dasarnya setiap orang berhak berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkup sosialnya yang tertuan dalam UUD 1945 pasal 28 F. Regulasi terhadap keberadaan media juga telah banyak dicanangkan agar masyarakat sebagai sasaran mendapatkan layanan informasi yang layak, benar, bertanggung jawab dan berdaya (UU No. 32 tahun 2002), memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum (UU No. 40 tahun 1999 pasal 6 huruf a dan c), hak mendapat informasi sebagai masyarakat umum guna mengembangkan kehidupan sosialnya (UU No. 14 tahun 2008) (Abdul Wahid dan Dhinar aji Pratomo, 2017: 3).

Masyarakat informasi yang berdampingan dengan media berbanding lurus dengan meluasnya wahana radikalisisasi. Salah satu kelompok radikalisis yang eksis dalam propaganda di media Indonesia adalah HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang telah banyak menggembor gemborkan sistem khilafah Islam sebagai pengganti sistem demokrasi pancasila yang dianggap menjadi solusi global atas segala permasalahan yang terjadi. Pada puncaknya dilansir dari situs berita resmi Kompas.com “Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia” (8/5/2017).

Dalam keputusan tersebut, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan keamanan, Wiranto memaparkan tiga alasan pemerintah membubarkan HTI. Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas dan ciri yang berdasarkan pancasila dan UUD 19945 sebagaimana diatur dalam UU No. 17 tahun 2013 tentang ormas. Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI.

Merunut dari asal katanya, radikalisme Islam merupakan gerakan politik kultural yang mempertentangkan secara kualitatif antara peradaban barat dan agama Islam. Penekanannya terhadap Islam yang luar biasa membuat kaum radikal menganggap bahwa semua sistem selain Islam adalah salah dan mereka menuntut penegakan kembali sistem Islam oleh perubahan sejarah (Youssef M. Choueiri, 2003: 239). Awal mula perjuangan pengembangan sistem Islam internasional ini pertama kali diperankan oleh Jamaah Ikhwanul Muslimin (*Muslim Brotherhood*). Ikhwanul Muslimin adalah pergerakan Islam yang didirikan oleh Hasan Al-Banna (1906-1949 M) di Mesir pada tahun 1941 M (Ghofar, M. Azizul, 2015: 1)

Realitas radikalisme Islam merupakan respon dari ekspansi peradaban barat yang dianggap universal dan mendominasi, sehingga hegemoni barat dianggap telah meliberalkan dunia Islam. Kekuatan politik, ekonomi dan kebudayaan yang besar dari barat menjadikan hegemoninya kepada dunia Islam secara memaksa. Kelahiran fundamentalisme sebagai wujud mempertahankan konsepsi Islam yang kaffah (*scriptural fundamentalisme*) yang dijadikan paradigma melawan dominasi barat yang dianggap bercitra hedonistik dan dekadensi moral (Afadlal, 2005: 35). Pada perkembangannya, wacana *defensive* tersebut berkembang menjadi Radikalisme yang membawa propaganda terhadap paradigma Islam yang kaffah.

Perang paradigma atau perang idealisme hegemonik terjadi sebagai hasil dari pertemuan westernisasi dan pribumisasi Islam. Keadaan tersebut tidak selamanya terjadi melalui kekuatan politik, namun yang paling penting dari sebuah

hegemoni adalah paradigma sebagai salah satu unsurnya. Perang paradigma inilah yang menjadikan realitas keberagaman masyarakat Indonesia menjadi tidak terkendali. Golongan radikal mencari identitas sosial kolektif yang melegitimasi segala bentuk tindakannya sebagai cita-cita Islam yang dianggap kaffah (Afadlal, 2005: 30). Terbukti dengan maraknya aksi kekerasan atas nama agama, pembantaian bahkan aksi teror bom yang disuarakan atas nama Tuhan. Miris, pada rentan tahun 2000 hingga sekarang aksi terorisme menghantui masyarakat Indonesia dengan berbagai cara seperti bom bunuh diri, perampokan bank, penyerangan tokoh agama dan aparat. Aksi terorisme tersebut justru berasal dari paradigma fundamentalisme, radikalisme hingga melahirkan aksi terorisme.

Nilai-Nilai Moderasi dalam Masyarakat Madani

Keragaman Indonesia merupakan keniscayaan dan tidak dapat dihilangkan. Itu pula yang menjadi landasan akan pentingnya moderasi di tengah masyarakat Indonesia. Setidaknya ada tiga alasan pentingnya moderasi beragama yang tercantum dalam buku Moderasi Beragama terbitan Kementrian agama. Pertama, salah satu esensi agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan yang menghargai kehidupan dan perdamaian. Kedua, perkembangan zaman akan semakin membawa manusia pada pluralitas demikian pula dengan agama yang harus dituntut adaptif terhadap perkembangan beserta penafsiran atasnya. Ketiga, dalam konteks keindonesiaan moderasi beragama dibutuhkan untuk merawat kebudayaan dan kearifan (Kemenag RI, 2019: 10).

Urgensi moderasi beragama di Indonesia harus dijadikan cetak biru perkembangan Islam dari dulu hingga sekarang. Model masyarakat moderat, kepemimpinan serta kehidupan sosial yang harmoni telah dicontohkan Nabi Muhammad dalam mendirikan masyarakat Madinah. Masyarakat yang lahir dari pluralitas kemudian menjadi peradaban yang maju sekaligus embrio lahirnya masyarakat yang demokratis. Keharmonisan dalam masyarakat Madinah yang dipimpin Nabi SAW, terwujud dalam kerukunan antar umat, gotong royong dan kedaulatan. Sebagaimana misi Islam sebagai pemberi perdamaian (Qs. al Hujurat: 10, Qs. Al Anfal: 61, An Nisa 90 dan 114), Nabi SAW telah sukses menjadikan Madinah sebagai basis masyarakat aman beradab, berbudaya dan bertamadun. (Azyumardi Azra, 1999: 110)

Azyumardi Azra mengajak masyarakat dewasa ini untuk membuat langkah mundur (*setback*) dalam mencari ruang membangun masyarakat madani untuk masa kini. Retrospeksi atau pandang balik meniscayakan sebuah analisis lagi elaborasi yang tentu membutuhkan kerangka historis dan sosiologis. Untuk mencapai ajakan tersebut, penulis mengambil Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman dalam upaya membaca nash-nash Al-Qur'an dan Hadits secara kontekstual,

sistematis dan komprehensif agar mampu menjawab persoalan kekinian. Double movement atau gerak ganda interpretasi merupakan metode penafsiran yang sistematis dan kontekstualis yang dimulai dari kondisi sekarang ke masa al-Qur'an diturunkan dan kembali lagi ke masa kini (Kurdi, 2010: 70). Satu pandangan khusus dari Fazlur Rahman mengenai Hadits juga berupa transformasi sunah aktual yang meniscayakan sebuah ruang ijtima yang terus menerus (*on going proces*) dan berkembang secara demokratis, kreatif dan dinamis (Kurdi, 2010: 341).

Dalam Al Qur'an, term moderasi beragama selalu dikaitkan dengan *umatan wasathan* (umat pertengahan) dalam Qs. Al Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ

"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu."

Dalam memahami ayat tersebut, Nabi SAW telah memberikan gambaran melalui ungkapan bahwa umat Islam adalah umat pertengahan yang akan menjadi saksi atas umat yang lain menuju keadilan. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam Hadits Shahih Bukhari No. 4487:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda: "Pada hari kiamat, Nuh akan dipanggil (Allah) dan ia akan menjawab: 'Labbaik dan Sa'daik, wahai TuhanKu!' lalu Allah bertanya: 'Apakah telah kau sampaikan pesan Kami?' Nuh menjawab: 'Ya.' Kemudian Allah akan bertanya kepada bangsa (umat) Nuh: 'Apakah ia telah menyampaikan pesan kami kepadamu sekalian?' Mereka akan berkata: 'Tidak ada yang memberikan peringatan kepada kami.' Maka Allah bertanya: 'Siapa yang menjadi saksimu?' Nuh menjawab: 'Muhammad dan umatnya.' Maka mereka (umat Muhammad) akan bersaksi bahwa Nuh telah menyampaikan pesan (Allah). {wayakunar rasulu 'alaikum syahida} (Dan Rasul menjadi saksi atas kalian) dan itulah maksud dari firman Allah jalla dzikruh: {wakadzalika ja'alnakum ummatan wasathan litakunu syuhada-a 'alannasi wayakunar rasulu 'alaikum syahida} (Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang adil supaya kamu menjadi saksi atas manusia. Dan 143): 2 (Baqarah al. QS). (saksi menjadi saksi atas kalian)" pertengahan adalah keadilan.

Quraish Shihab memberikan ibarat keharusan umat Islam menjadi umat yang moderat dan teladan sebagaimana posisi ka'bah yang berada di tengah pula. Posisi pertengahan menjadikan seseorang tidak memiliki tendensi fanatisme ke kiri atau ke kanan sehingga akan mengantarkannya pada keadilan (Syihab, 2002: 348). Sebagaimana dalam hadits diatas, Nabi SAW menekankan posisi umat yang adil

sebagai “*syahida*” atau bahwa kaum muslimin akan menjadi saksi di masa datang atas baik buruknya pandangan dan kelakuan manusia. Ayat tersebut menindikasikan pergulatan pemikiran ataupun aliran yang pada akhirnya umat pertengahan ini yang akan menjadi rujukan dan saksi atas kebenarannya.

Dalam Kitab Fath al-bari syarah Shohih al-Bukhari memahami kata “*wasath*” dengan makna “*al Adl*”. Sebagaimana ungkapan At-Thobari : “*wal-wastu al adlu*” bahwa pertengahan adalah keadilan. Sambungnya ungkapan At-Thobari dalam mengartikan “*al wast*” sebagaimana ungkapan orang Arab dengan makna “*al-khiyar*” atau pilihan diantara dua ekstrim. Mereka dalam pertengahan dalam beragama, tidak berlebihan (*ghulu*) seperti berlebihannya umat Nasrani dan tidak pula abai (*taqshir*) sebagaimana abainya umat Yahudi (Fathul Barri, 4489). Ar-Razi juga menisbahkan kepada hadits Nabi yang berbunyi “*khairu al-umuuri awsathu*” sebaik-baik persoalan adalah yang pertengahan, kata *awsat* tersebut diartikan sebagai perkara paling adil dan baik (Shihab, 2019: 11). *Wasathiyah* bukan sebuah mazhab dalam Islam dan bukan juga sekte baru melainkan salah satu ciri utama dan jalan menuju nilai luhur Islam. Hal ini sebagaimana kisah dari Jabir bin Abdillah yang termaktub dalam sebuah hadis, yakni:

“Ketika kami sedang bersama Nabi Saw. tetiba Nabi Saw. membuat sebuah garis. Di samping kanannya juga dibuat dua garis, begitu juga di samping kirinya dibuat dua garis lain. Lalu Nabi Saw. meletakkan tangan beliau pada satu garis yang di tengah itu sambil bersabda: ‘Inilah jalan Allah,’ lalu membaca ayat: Dan sungguh inilah jalan-Ku yang lurus. Maka ikutilah! Jangan kamu ikuti jalan-jalan (yang lain) yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. (Q.S. 6: 153).” (HR. Ibnu Majah No. 11).

Jika merujuk pada hadis di atas, garis tengah (*al-khatth al-awsath*) tersebut merupakan jalan lurus (*shirâth mustaqîm*) yang dikehendaki Islam. Dengan demikian, *wasathiyah* merupakan jalan lurus yang telah digariskan oleh Al-Qur`an dan hadis. *Wasathiyah* dalam beragama juga dapat ditarik melalui urgensi kehidupan dalam dua sudut pandang agama besar Yahudi dan Nasrani. Menurut Hamka, umat Yahudi adalah umat yang terlalu condong kepada dunia, benda, dan harta. Bahkan, dalam catatan kitab sucinya sendiri pun kurang sekali dikisahkan soal akhirat. Sebaliknya, umat Nasrani lebih mementingkan akhirat saja dengan meninggalkan segala macam kemegahan dunia sampai mendirikan biara-biara tempat bertapa dan menganjurkan para pendeta untuk tidak menikah (Muhamad Ulinnuha, 2020: 59). Senada dengan Hamka, Hasbi Ash-Shiddieqy juga membagi dua golongan sebelum datangnya Islam layaknya Hamka dalam tafsirnya, yaitu Pertama, golongan *maddiyūn* (materialis) yang hanya mementingkan keduniawian (materi), seperti halnya orang-orang Yahudi. Kedua, golongan *ruhaniyūn* (spiritualis) yang

terlalu berpegang pada kejiwaan saja, serta meninggalkan keduniawian dan kenikmatan, seperti golongan Nasrani dan Shabiah (Muhamad Ulinuha, 2020: 60).

Model moderasi dalam berbagai perspektif mendorong lahirnya umat yang seimbang dalam kehidupannya. Keseimbangan tersebut yang akan menjadikan cita-cita masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang adil dan beradab. Secara historis, aktualisasi model masyarakat tersebut telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam pembentukan masyarakat Madani di Madinah. Kota Madinah merupakan kota yang majemuk dan kental akan tradisi kesukuan. Sehingga sebelum kedatangan Nabi SAW, kota Madinah terkenal dengan konflik antar suku. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Nabi Muhammad tampil sebagai pemimpin yang teladan lagi revolusioner. Berbeda dengan tradisi kekuasaan pada umumnya yang menggagas pemerintahan secara monarki absolut, Nabi SAW membangun kekuasaannya yang bermuatan sosialis dan demokratis (M. Basyir Syam, 2015: 157).

Menurut Michael H Hart, Nabi SAW adalah satu-satunya orang yang berhasil meraih keberhasilan luar biasa baik dalam hal spiritual maupun kemasyarakatan. Hart mencatat bahwa Muhammad mampu mengelola bangsa yang awalnya egoistis, barbar, terbelakang, dan terpecah-belah oleh sentimen kesukuan menjadi bangsa yang maju dalam bidang ekonomi, kebudayaan bahkan politik. Bahkan Hart menempatkan Nabi SAW sebagai rangking pertama pemimpin dunia yang paling berpengaruh (Hart, 2005: 57). Nabi SAW memberikan dominasi besar dalam kepemimpinannya di antara kemajemukan masyarakat Madinah. Bukan berdasarkan kekuatan politik atau berperang, namun hegemoni Nabi SAW dan Islam lahir dari nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban. Salah satu magnum opus kesuksesan kepemimpinan Nabi adalah dibentuknya piagam madinah sebagai konstitusi yang melandasi Madinah sebagai sebuah negara.

Piagam Madinah yang telah disahkan Nabi SAW terdiri dari 47 pasal. Secara umum, batu-batu dasar yang telah diletakkan oleh Piagam Madinah sebagai landasan kehidupan bernegara untuk masyarakat majemuk di Madinah. Dominasi Nabi SAW, bukan menjadikan Madinah sebagai negara Islam, melainkan sebuah kesatuan masyarakat yang bermuatan moderat dan berkeadilan. Dalam catatan sejarah pun, Piagam Madinah dianggap sebagai embrio konstitusi demokratis yang pertama seperti ungkapan Zaenal Abidin Ahmad dalam bukunya : Piagam Madinah: Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia. Konflik kesukuan, keagamaan yang terjadi di Madinah semakin menghilang seiring toleransi, persatuan, dan visi kebangsaan yang semakin berkembang. Pembentukan piagam Madinah tersebut bertumpu pada sikap toleran, musyawarah dan kearifan perdamaian yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sehingga harmoni masyarakat Madinah terbentuk berlandaskan moralitas, bukan atas kekuasaan yang kuat atas yang lemah.

Implementasi masyarakat madani dalam konteks keindonesiaan merupakan hal yang niscaya. Sebagai negara yang majemuk, para pemimpin Indonesia telah berupaya membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan moderatisme masyarakat Madani. Setidaknya ada 3 (tiga) prinsip dasar negara yang diadopsi oleh Indonesia yang sangat memungkinkan tumbuhnya watak moderat masyarakatnya dalam berbangsa, bernegara, dan beragama, yaitu: Pertama, Indonesia bukanlah negara sekuler, bukan negara teokratis atau agama, tetapi negara kebangsaan yang berketuhanan atau beragama. Kedua, negara berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan kebebasan beragama yang lapang dan bertanggungjawab. Ketiga, Negara melindungi kebhinekaan atau keragaman (heterogenitas) dalam agama, budaya dan ras (Kemenag, 2019: 54).

Pengarusutamaan Moderasi Beragama Berbasis Hegemoni Media

Retrospeksi berguna untuk mengevaluasi, merefleksikan, mengingat kembali kejadian di masa lalu sebagai salah satu landasan mengambil pemahaman dan keputusan di masa depan. Selaras dengan Fazlur Rahman dalam memahami al Qur'an dan sunah yang memerlukan retrospeksi dalam proses penafsirannya. Bagaimanapun, al-Qur'an dan sunah lahir melalui setting sosial historis tertentu yang pasti bersifat situasional. Hemat penulis, bahwa al-Qur'an dan sunah akan terus hidup apabila kita dapat terbuka dengan situasi dan keadaan yang senantiasa berubah. Dalam istilah Rahman, penafsiran situasional atau historis dalam bentuk sunah aktual (sunah yang hidup) agar kaum muslim dapat menyimpulkan norma-norma untuk kebutuhan zamannya melalui etika yang memadai (Kurdi, 2010: 340).

Pergeseran zaman hari ini, membuat kehidupan keagamaan menghadapi tantangan yang ekstrim. Masyarakat dihadapkan pada era disrupsi yang mengakibatkan terjadinya perubahan radikal pada seluruh aspek kehidupan. Kata disrupsi berarti "hal tercerabut dari akarnya", yang biasa diidentikan dengan perkembangan teknologi informasi yang masif. Media sosial merupakan model disrupsi yang nyata dan terbukti besar pengaruhnya. Karena media sosial ini bersifat membangun jejaring, tidak memihak, interaktif melibatkan peran aktif manusia, dan bahkan seringkali dapat dimanipulasi. Kemudahan akses internet yang tidak memiliki aturan baku ini layaknya pasar bebas, siapa saja dapat menuliskan informasi apa pun bahkan catatan pribadi pun bisa dipublikasikan dan menjadi konsumsi secara luas. Bahkan, keberlimpahan sumber informasi ini juga telah menjadi media belajar yang kian digemari oleh generasi milenial (Kemenag, 2019: 89).

Pada dasarnya media sosial itu netral, sehingga dampak positif ataupun negatif tergantung di tangan siapa ia dikendalikan. Sebagaimana arena pertempuran, siapa yang paling mendominasi dan berkuasa itulah pemenangnya. Sadar ataupun tidak, Nabi SAW melalui sunah aktualnya menunjukkan pada kita sebuah hegemoni

kekuasaan moral dan intelektual yang mendominasi masyarakat Madinah. Bukan dengan kekuatan politik ataupun militer, Nabi SAW menciptakan kehidupan moderat yang damai melalui kepemimpinan dan hegemoni nilai. Sehingga sebagai umat mayoritas, Islam yang membawa amanah moderasi menciptakan umat mayoritas yang kuat dan mampu menyebarkannya kepada kaum-kaum minoritas.

Hegemoni berasal dari bahasa Yunani kuno "*eugemonia*" diterapkan untuk menunjukkan dominasi posisi yang diklaim oleh negara-negara kota secara individual. Dalam pengertian dewasa ini, Hegemoni menunjukkan dari suatu kepemimpinan dari suatu negara tertentu terhadap negara lain secara longgar maupun ketat yang terintegrasi dalam negara pemimpin (Nezar Patria, 2015: 115). Gramsci menyatakan bahwa hegemoni memperhatikan situasi realitas sosial masyarakat atau momen dimana filsafat dan praktek sosial masyarakat menyatu dalam keadaan seimbang. Dominasi merupakan realitas yang menyebar melalui masyarakat dalam sebuah lembaga dan manifestasi individu dalam ruh yang membentuk moralitas, adat, religi, prinsip-prinsip politik dan semua relasi sosial, terutama dari intelektual menuju moral (Nezar Patria, 2015: 121).

Serat penghubung antara beragam realitas sosial menurut Gramsci dilakukan oleh intelektual. Gramsci memberikan gambaran peran intelektual sebagai organiser hegemoni menjadi dua tipe, yaitu tradisional dan organik. Tipe tradisional merupakan kelas intelek yang otonom dan independen terlepas dari kelompok sosial yang dominan. Kelompok ini merupakan tokoh yang memiliki tugas-tugas kepemimpinan untuk masyarakat (*given society*), seperti agamawan, filsuf dan seniman (Nezar Patria, 2015: 163). Sedangkan tipe organik merupakan intelek yang berhubungan langsung kelompok-kelompok sosial, politik maupun ekonomi serta memberikan homogenitas kesadaran akan fungsinya. Tipe intelek ini berpenetrasi sampai ke massa dan terlibat dalam kompleksitas kesatuan di masyarakat, seperti orang-orang pakar dalam kelas buruh.

Menarik kesimpulan dalam proses mengarusutamakan moderasi beragama sebagai suatu nilai yang harus mendominasi, intelektual diletakan sebagai poros penting bagi organiser hegemoni. Proses yang diisyaratkan oleh hegemoni sebagai suatu kesatuan yang holistik, salah satu unsur kesatuan tersebut terletak pada dominasi media. Kedua tipe intelektual sebagai organiser yang mendominasi harus mampu mengisi ruang-ruang sosial di masyarakat. Karena pada era post truth seperti sekarang, otoritas dan kapasitas para intelektual mengalami penyempitan ruang. Tom Nichols dalam bukunya "*The dead of Ekspertise*" matinya kepakaran, menuliskan keprihatinnya melihat masyarakat yang tidak lagi mementingkan kapasitas sumber keilmuan.

Islam mengisyaratkan keterpaduan antara agama dan intelektual dengan kehidupan sosial, sebagaimana dalam sebuah hadits : “*Seandainya ahli ilmu menjaga dan meletakkan ilmu pada ahlinya, niscaya ia akan memelihara penduduk pada zamannya*” (HR. Ibnu Majah no. 253). Az-Zuhri berkata bahwa ilmu diserupakan laki-laki yang hanya disukai oleh laki-laki yang mencintai perkara-perkara mulia (*Hasyiah As-sanadi a’ala Ibnu Majah*). Islam tidak memperkenankan umatnya untuk sembarangan dalam mengambil sumber keilmuan. Termasuk perhatian seorang intelektual yang hanya khawatir terhadap urusan dunia maka sungguh mereka akan binasa, sebaliknya yang khawatir terhadap kepentingan akhirat maka sungguh Allah cukupkan dunianya. Hal tersebut terdapat dalam Hadits riwayat Ibnu Majah No. 4096 yang oleh Shohib Abdul Jabbar dijadikan rujukan menguatkan pandangan tentang ahli ilmu (Kitab *Jami’us shohih lisunani wal masanid*). Dalam kitab *tadzkiratul maudu’at*, Al Fattani mengatakan keberhasilan ahli ilmu terletak dari perhatian atas akhirat dan dunianya, jika ahli ilmu tidak memperhatikan keduanya maka tidak ada batasan dengan binatang. Begitulah sunah hadir sebagai sebuah etika yang hidup.

Muhammad Nuruzzaman (Stafsus Menteri Agama RI) menyatakan bahwa efektivitas perkembangan isu nasional berasal dari media sosial, terutama twitter. Algoritma “viral” dalam media sangat berpengaruh kepada penyebaran informasi secara luas. Media sosial menjadikan Twitter sebagai sumber inspirasi di mana banyak tokoh dan pengguna awam yang pendapatnya layak dikutip dan dijadikan bahan penulisan berita (Elvi Susanti, 2015: 8). Sehingga setiap platform media akan menunjukkan diskursus yang sama dalam penyebaran informasinya. Konten “viral” tersebut akan menghiasi setiap media dan secara otomatis masuk ke dalam algoritma media setiap orang.

Sebagai contoh Implementasi “Habib Milenial” yang disematkan kepada Habib Jafar yang telah berhasil mengisi media-media sosial dengan konten dakwah moderatnya. Habib yang bernama lengkap Husein Ja’far Al Hadar yang lahir pada 21 Juni 1988 tersebut memiliki semua platform media sosial yang aktif dan populer. Akun twitternya memiliki 699 ribu pengikut, instagramnya memiliki 2,6 juta pengikut, akun youtubanya memiliki 1,24 juta subscriber dan sering menghiasi pertelevisian dan akun lain sebagai tamu narasumber. Cinta, toleransi dan nasionalisme menjadi kunci utama dakwahnya. Berawal dari maraknya konten-konten negatif yang bertebaran di media sosial membuat Habib Ja’far tertarik membuat konten dakwah yang selaras dengan keadaan masyarakat zaman ini (Riska Mailinda, 2022: 145). Sebagai seorang agamawan yang disebut “milenial”, Habib Ja’far memberikan edukasi secara luas dan masif melalui media, sehingga memiliki pengaruh yang cukup besar (Riska Mailinda, 2022: 142). Melihat realita tersebut, penting kiranya menciptakan hegemoni dengan intelektual sebagai

porosnya yang mengisi setiap sendi sosial masyarakat termasuk dalam media sosial. Inilah yang disebut momentum milenial yang membutuhkan otoritas intelektual yang mengisi secara adaptif.

Sebagai suatu upaya, optimalisasi dan revitalisasi kaum intelektual akan menemukan momentumnya juga beriringan dengan pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan. Hegemoni erat dengan dominasi penguasa yang memiliki mata lebih luas dalam melihat kekosongan intelektual di ruang-ruang masyarakat. Pembentukan ruang publik yang oleh Habermas dikatakan sebagai “ruang yang dimiliki bersama” merupakan reservoir bagi segala interaksi sosial sederhana menuju kolektifitas (Sakaruddin, 235).

Melalui Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), pada akhir Desember 2018 memfasilitasi dialog antariman para agamawan, budayawan, akademisi, generasi milenial, dan praktisi media, untuk berdialog bersama mencari solusi menjaga kebersamaan umat. Dialog itu kemudian menghasilkan suatu kesepakatan bersama yang dikenal dengan nama “Risalah Jakarta”, yang dijadikan sebagai ruh untuk merumuskan program-program Kementerian Agama di Tahun 2019 (Kemenag, 2019: 98).

Adanya ruang-ruang intelektual tanpa limitasi memberikan dampak yang luas bagi perkembangan pemikiran maupun kebijakan. Sehingga ketika berbicara tokoh agama, tokoh pemerintah, praktisi hukum ataupun seniman harus senantiasa berkolaborasi menciptakan ruang moderat. Bukan ditinjau dari pengertian usia, namun “milenial” tersebut menjadi sematan bagi para intelektual yang adaptif dan efektif dalam memberikan perannya. Sehingga cita-cita bersama menciptakan masyarakat madani harus dilakukan secara holistik dalam publik maya maupun nyata.

Poin penting daripada pembentukan masyarakat milenial madani, bertumpu pada kolaborasi yang aktif dari semua lini dengan “intelektual” sebagai porosnya. Mereka harus secara aktif menggiring masa pada arus utama moderasi yang bercirikan toleransi dan musyawarah (Qs. 42: 38). Pemerintah dalam hal ini kementerian agama juga harus senantiasa merevitalisasi peran kolaborasi secara ramah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Konsensus yang dihasilkan akan menjadi payung kebijakan dalam membangun propaganda bermuatan moderat. Jika menghayati agama dalam atmosfer kebencian dan kekerasan, maka penghayatan hanya akan diracuni oleh nafsu. Namun, jika menghadirkan sisi kedamaian dalam proses penghayatan maka akan menghadirkan kedamaian pula dalam menghayati agama (Syamsul Arifin, 2019: 15).

SIMPULAN

Mengarusutamakan moderasi beragama menjadi isu yang terus diupayakan mengingat radikalisasi dengan berbagai modelnya semakin berkembang. Memasuki zaman milenial yang ditandai dengan perkembangan media informasi dan komunikasi yang masif, radikalisasi menyusup melalui ruang-ruang tersebut. Upaya yang adaptif terhadap perkembangan zaman harus senantiasa dilakukan, termasuk retrospeksi pembangunan masyarakat madani sebagai model masyarakat moderat zaman kepemimpinan Nabi SAW. Potret masyarakat Madinah dan masyarakat Indonesia yang majemuk adalah wahana retrospeksi masyarakat zaman ini. Pembangunan masyarakat madani, piagam Madinah ataupun NKRI dan Pancasila adalah konsensus yang dihasilkan dari nilai musyawarah dan toleransi dengan cita-cita keadilan.

Islam yang moderat adalah rahmat bagi seluruh alam di setiap ruang dan waktu. Pembentukan masyarakat moderat dewasa ini merupakan revitalisasi pembentukan masyarakat madani berdasarkan sunah aktual yang harus terus dirasakan kehidupannya. Melalui pembentukan hegemoni berbasis media, mengindikasikan upaya sadar secara holistik bagi para intelektual agar mampu mengisi setiap ruang sosial di masyarakat. Membentuk ruang musyawarah secara luas tanpa limitasi, penyebaran konten berbasis moderasi dan penguatan peran intelektual dalam setiap bidang adalah upaya pendekatan adaptif. Dalam ruang-ruang sosial yang terbentuk berdasarkan moderatisme akan mendorong kolektifitas masyarakat yang lebih toleran dan mengamini persatuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhori (2017). *Shohih Bukhori*. Mesir Maktabah Asy- Syoruki Ad- Dauliyah
- Adamson, Walter L (1980). *Hegemony And Revolution*. London : California Press.
- Afadlal,dkk (2005). "*Islam dan Radikalisme di Indonesia*" Jakarta: LIPI Press.
- Azra, Azyumardi (1999). *Menuju Masyarakat Madani: gagasan, fakta dan tantangan*. Bandung: Rosdakarya.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2015). Mengulik Data Suku di Indonesia. Retrieved November 18, 2015, from <https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html>
- Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia. (2023). Moderasi Beragama Masih Akan Muncul dalam RPJMN 2025-2029. Retrieved March

- 16, 2023, from <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/moderasi-beragama-masih-akan-muncul-dalam-rpjmn-2025-2029>
- Ghofar, M. Azizul (2015). *Salah Kaprah Khilafah*. Yogyakarta:Depublish.
- Irama, Yoga dan Liliek Channa AW. (2021). "Moderasi Beragama Dalam Perspektif Hadis" *Mumtaz*. 5(1), 41-57.
- Juditha, Christiany. (2018). "Hegemoni Media Sosial: Akun Gosip Instagram @Lambe_Turah" *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*. 22(1), 16-30.
- Kurdi dkk (2010). *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: elSaq Press.
- Kementrian Agama RI (2019) *Moderasi Beragama*. Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI
- Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2017). BNPT Minta Kominfo Blokir 22 Situs Radikal. Retrieved March 31, 2017, from https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4627/BNPT+Minta+Kominfo+Blokir+22+Situs+Radikal/0/berita_satker
- Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2017). Masyarakat Indonesia: Malas Baca tapi Cerewet di Medsos. Retrieved October 10, 2017, from https://www.kominfo.go.id/content/detail/10862/teknologi-masyarakat-indonesia-malas-baca-tapi-cerewet-di-medsos/0/sorotan_media
- Mailinda, Riska. (2022). "Moderasi Beragama Kaum Milenial: Studi Pemikiran Habib Husein Ja'far Al-Hadar" *Jurnal Ilmu Agama* 23(2), 142-156.
- Mandjarreki, Sakaruddin. (2018). "Agresi Media Dan Kematian Ruang Sosial (Tafsir Sosiologis atas Hegemoni Media Sosial)" *Jurnalisa*. 4(2), 226-240.
- Nichols, Tom (2021). *Matinya Kepakaran terj. Ruth Meigi P*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Patria, Nezar dan Andi Arief (2015). *Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2018). Media Sosial, Post Truth dan Literasi Digital. Retrieved October 19, 2018, from <https://setkab.go.id/media-sosial-post-truth-dan-literasi-digital/>
- Shihab, M. Quraish (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M Quraish (2019). *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Jakarta: Lentera Hati.

- Susanti, Elvi. (2015). Analisis Wacana Kritis: Hegemoni Media Sosial Twitter mengenai Isu-isu Nasional di Indonesia dan Implikasinya pada Mata Kuliah Analisis Wacana di Perguruan Tinggi. *Skripsi*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Youssef M. Choueiri (2003). *Islam Garis Keras : Melacak Akar Gerakan Fundamentalisme*. Yogyakarta : Qonun.
- Wahid, Abdul dan Dhinar aji Pratomo (2017). "*Masyarakat dan Teks Media: Membangun Nalar Kritis atas Hegemoni Media*" Malang: Brawijaya Pres.
- Widi, Shilvina (2023, february 3). Pengguna Media Sosial di Indonesia sebanyak 167 juta pada 2023. *dataIndonesia*. Retrieved from <https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023>
- Ibnu Majah (1996), *Sunan Ibnu Mâjah*, Riyadh: Maktabah al-Ma'ârif.